

Koruptor Obat Cacing Gentayangan

PONTIANAK. Masih banyak penanganan kasus korupsi yang menggantung di Kalbar. Dugaan penyimpangan proyek peningkatan ketahanan fisik anak sekolah pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sanggau APBD 2006 dan 2007 alias korupsi obat cacing, senilai Rp9,8 miliar, pelakunya masih gentayangan.

"Kita minta pelakunya segera ditangkap dan dijebloskan dalam penjara, apabila terbukti bersalah. Jangan dibiarkan gentayangan, tanpa diproses hukum," tegas Bonifatius Benny SH, anggota DPRD Kalbar dari Partai Demokrat kepada Equator, kemarin.

Kasus yang displit dalam dua berkas dengan dua tersangka ya-

itu FPM, pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek 2006 dan PAT yang menjadi PPK untuk proyek 2007 ini sudah ditangani Kejati Kalbar. Proyek tersebut dua tahun berturut-turut dianggarkan dalam APBD 2006 senilai Rp3,641 miliar dan 2007 senilai Rp6,270 miliar.

Bentuk pelaksanaan proyek itu melalui pemberian obat cacing dan multi vitamin untuk anak sekolah. Namun dalam pelaksanaannya, diduga kuat terjadi pengelembungan harga atas jenis obat cacing Embacitrine Syrup dan multi vitamin Vicalcine Syrup.

Total pengadaan untuk obat cacing adalah 219.030 botol dan

vitamin 109.518 botol. Diberikan kepada sekitar 54 ribu anak sekolah dasar dengan dosis masing-masing dua kali pemberian.

Berdasarkan hasil penyidikan kejaksaan, dilihat dari sejumlah bukti yang berhasil dikumpulkan, terjadi pengelembungan harga. Karena dari perbandingan harga riil di pasaran dengan harga perhitungan sendiri (owner estimate) yang disepakati dalam kontrak, terdapat perbedaan harga yang sangat signifikan dan merugikan negara.

Harga pasaran Embacitrine Syrup Rp7.200 per boks atau Rp600 per botol menjadi Rp6.500 pada pengadaan 2006 dan Rp6.975 pada 2007. Sedangkan

untuk Vicalcine Syrup di pasaran Rp2.170 per botol menjadi Rp18.500 pada pengadaan 2006 dan Rp20.450 pada 2007.

Dalam dua tahun anggaran PT Rajawali Nusindo berturut-turut menjadi pemenang lelang. Sehingga membuat tim penyidik mengarahkan pengeledahan di perusahaan milik negara tersebut.

Sumber *Equator* di Kejati Kalbar menyebutkan, hingga saat ini pihak kejaksaan telah memeriksa 18 orang saksi termasuk tersangka. Sementara untuk melihat kerugian negara, Kejati telah mintakan audit ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Pontianak. Sayangnya, proses hukum kasus ini terkesan

tenggelam.

"Siapapun pelakunya, kita berharap pihak Kejati bisa memprosesnya hingga ke tingkat Pengadilan. Langkah ini penting dilakukan demi memberikan efek jera kepada pelaku koruptor, sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi. Bagi saya tidak ada kata lain. Korupsi harus diberantas tuntas hingga ke akar-akarnya," ujar Benny.

Korupsi, kata Benny, merupakan kejahatan yang berdampak besar terhadap masyarakat. Karena itu, aparat hukum yang ada di daerah harus memiliki komitmen kuat melawan korupsi. "Jangan ada keinginan mengampuni koruptor," serunya. (bdu)